

Desentralisasi dalam pengelolaan air irigasi tersier / Irfan Ridwan Maksum

Irfan Fahmi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20441831&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model

Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan

menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi

mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak

mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang

seharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan

Kabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehen

menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan

tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informan

diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga

praktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktik

desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan

karakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi

territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak diperlakukan meskipun wacana akademik dan potensi serta

kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan

mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada

umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku

pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam

kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya

regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi

fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of

Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National

and State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this research

experienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach.

Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and

analyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were

not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia

which is fully centralized through deconcentration. Only the territorial decentralization is the basic of tertiary irrigation

management in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation

management both in

Indonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the

grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the

irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of

functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920.